

PIIL PESENGGIRI : STRATEGI RESOLUSI KONFLIK MENGUNAKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN PANCASILA

PIIL PESENGGIRI: STRATEGY OF CONFLICT RESOLUTION THAT RAISES RELIGIOUS VALUES AND PANCASILA

Tubagus Ali Rachman Puja Kesuma & Deri Cicilia

IAIN Metro

Alumni PPs Kajian Budaya Universitas Padjadjaran

king_rachman@yahoo.com, chici_pkn09@yahoo.com

Abstrak

Konflik Semaka terjadi antara suku Lampung dengan suku Jawa. Pemicunya adalah tindakan kriminal dan aksi 'main hakim sendiri'. Konflik semakin meluas karena didasari prasangka dan kecemburuan sosial yang telah mendarah-daging. Masalah yang teridentifikasi dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi aktualisasi kearifan lokal Piil Pesenggiri yang bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an dalam rangka resolusi konflik Semaka? Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dan metode yang digunakan adalah *Ex Post Facto*. Subjek penelitian di tentukan dengan teknik *snowball sampling*, dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman. Selanjutnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dan karakter Piil Pesenggiri itu sendiri merupakan pengejawantahan dari syariat Islam dan menjadi pilar idiologi Pancasila. Lebih lanjut lagi, penerapan falsafah Piil Pesenggiri sebagai pendekatan penanganan konflik menjadi sebuah cara yang efektif untuk menangani konflik di Semaka. Oleh karena itu, filosofi Piil Pesenggiri juga diharapkan dapat menyelesaikan konflik di daerah lain.

Kata kunci: Piil Pesenggiri, Islam, Pancasila, Penanganan Konflik

Abstract

Semaka conflict occurs between the Lampung tribe and the Javanese tribe. The trigger is a crime and 'vigilante' action. The conflict is widespread because it is based on the ingrained prejudice and social jealousy. The problem identified in this research is how the actualization strategy of local wisdom Piil Pesenggiri synergizes with the values of Pancasila and Islam in the framework of conflict resolution in Semaka District? This research is a descriptive qualitative research and the research method is Ex Post Facto. The subjects of the research are chosen by using snowball sampling technique, and the collected data was analyzed by using Interactive Model Analysis from Miles and Huberman. Then, the result shows that the value and character of Piil Pesenggiri itself is a manifestation of the Islamic Shari'a and a pillar of Pancasila ideology. Furthermore, dealing with Semaka Conflict, the actualization of the Piil Pesenggiri philosophy as a social approach becomes an effective way to cope with the conflict in Semaka. Therefore, the Piil Pesenggiri philosophy is also expected to resolve a conflict in other areas.

Keywords: Piil Pesenggiri, Islam, Pancasila, Conflict Handling.

Pendahuluan

Lampung merupakan salah satu provinsi yang masyarakatnya sangat plural. Keberagaman masyarakat suku Lampung ini terutama disebabkan oleh program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah pada kurun waktu 1969/1970 dan terus berlanjut sehingga 1974/1975, walaupun sejak zaman kolonial Belanda pada tahun 1901 transmigrasi ke wilayah Lampung juga telah dilakukan. Tidak heran jika Lampung menjadi salah satu daerah pionir tujuan transmigrasi penduduk pulau Jawa dan Bali saat itu (Holilulloh, 2001:66). Seiring berjalannya waktu, lambat laun penduduk pulau Jawa, Bali, dan

daerah lainnya secara swadaya berbondong-bondong bermigrasi ke Lampung karena melihat sanak saudaranya sukses ditanah perantauan.

Secara resmi, transmigrasi di Kecamatan Semaka merupakan salah satu yang tertua di provinsi Lampung yang awalnya dilaksanakan pada tahun 1921/1922 dengan masyarakat transmigran berasal dari daerah Wonosobo, Jawa Tengah (Levang, 2003: 9). Transmigrasi ini merupakan kelanjutan dari keberhasilan program serupa sebelumnya di desa Bagelen, kabupaten Pesawaran dan Kecamatan Semaka saat itu masih menjadi bagian dari kecamatan Wonosobo, Kabupaten Lampung Selatan.

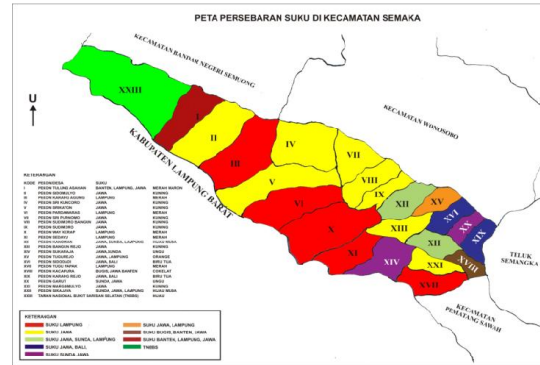
Pascakemerdekaan, program transmigrasi terus berlanjut baik yang dicanangkan pemerintah maupun secara swadaya. Bahkan, pada kurun waktu 1969/1970 dan terus berlanjut hingga 1974/1975, Lampung menjadi salah satu daerah pionirtujuan transmigrasi (Holilulloh, 2001: 66). Pesertanya pun tidak hanya dari daerah Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah tetapi juga dari berbagai daerah lain di pulau Jawa dan Bali.

Kesuburan tanah dan beragamnya iklim ditunjang dengan topografi daerah yang baik dan sangat cocok untuk bercocok tanam kian menjadikan Lampung menjadi objek perantauan daerah-daerah lain di Indonesia. Hal tersebut memunculkan komunitas koloni (*enklave*) pribumi (suku Lampung) dan perkampungan suku pendatang sebagai wujud primordialisme masyarakat pendatang. Hal ini membuat Lampung menjadi daerah yang terdiri dari beragam unsur suku, agama, dan ras (SARA).

Pengelompokan masyarakat/suku pendatang sebagai wujud ikatan primordialisme, tampak dari nama kecamatan/desa/dusun/kampung yang ditempati suku pendatang tersebut. Misalnya daerah Semarang, Purworejo, Purwokerto, Purwodadi, Wonosobo, Pringsewu, dan Klaten merupakan wilayah yang penduduknya berasal dari Jawa Tengah. Kemudian, Wonomulyo, Donomulyo, Banyumas, Wonogiri, dan Madura merupakan wilayah yang penduduknya dari Jawa Timur. Jogja, Bantul, Klaten, Sritejo Kencono, Krajan, Trimurjo, Wonosari, Wates, dan Sidomulyo merupakan wilayah yang penduduknya dari Yogyakarta dan Solo. Balinuraga, Bali Sadar Utara, Rama Nirwana, Rama Dewa, Rukhti Harjo, dan Seputih Raman merupakan wilayah dengan penduduknya berasal dari Bali. Sumber Jaya, Bandung Baru, Sukaraja, Air Bakoman, Sinar Banten, Fajar Bulan, Panaragan, Cilimus, Subang, merupakan wilayah dengan penduduk berasal dari Jawa Barat dan Banten. Sinar Semendo, Ogan, Pelembang, dan Komerling merupakan wilayah dengan penduduk berasal dari Palembang (Sumatera Selatan). Kampung Bugis merupakan wilayah dengan penduduk berasal dari Bugis (Sulawesi). Kampung Ambon merupakan wilayah dengan penduduk berasal dari Maluku.

Suku pribumi sendiri mendiami beberapa wilayah koloni (*enklave*) seperti desa/dusun Banjar Agung, Buyut Udik/Iilir, Seputih Agung, Padang Ratu, Menggala, Sukadana, Kota Agung, Ulu Belu, Batu Brak, Sekincau, Liwa, Gunung

Batin, Rajabasa, Kalianda, Baradatu, Negara Ratu, Negara Batin, Bandar Negeri Semuong, Way Kerap, Semaka, Anak Tuha, Pubian, Ratu Aji, Gunung Sugih, Terbanggi Besar, dan Kota Bumi. Untuk Kecamatan Semaka, Keberagaman suku dapat dideskripsikan dalam gambar berikut.



Gambar 1
Persebaran Suku di Kecamatan Semaka
(Profil Kecamatan Semaka tahun 2014
d disesuaikan dengan hasil Observasi Lapangan,
23-26 Maret 2014)

Pada satu sisi, keberagaman masyarakat Lampung, khususnya di Kecamatan Semaka, dengan hadirnya suku pendatang membawa dampak positif, terutama untuk semakin mempererat persatuan dan kesatuan nasional melalui proses asimilasi dan akulturasi budaya. Tonybee (dalam Herimanto dan Winarno, 2010) berpendapat bahwa penyebaran budaya ini dapat terjadi melalui beberapa jalur. *Pertama*, aspek budaya selalu masuk secara individual. *Kedua*, kekuatan menembus suatu budaya berbanding terbalik dengan nilainya. *Ketiga*, unsur budaya yang masuk akan menarik unsur-unsur budaya yang lain. *Keempat*, aspek atau unsur budaya yang dinilai tidak berbahaya ditanah asalnya dapat berubah menjadi berbahaya bagi masyarakat yang didatanginya. Hal ini berarti bahwa budaya dalam suatu masyarakat itu dapat berubah (Herimanto dan Winarno, 2010: 35). Dalam konteks ini, bersatunya keberagaman masyarakat di provinsi Lampung dilambangkan dalam semboyan *Sang Bumi Huwa Jurai* yang artinya bahwa penduduk Lampung terdiri dari *Jurai*/golongan penduduk asli dan pendatang sebagai wujud keharmonisan kehidupan bermasyarakat (Syajono, 1994: 4). Hal tersebut sejalan dengan amanah dasar negara Pancasila dan semboyan "*Bhinneka Tunggal Ika*" yang terwujud dalam tata pergaulan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di sisi lain, keberagaman masyarakat Lampung, khususnya di Kecamatan Semaka, juga membawa dampak yang negatif bagi kehidupan masyarakatnya. Keberagaman masyarakat di Lampung seringkali memicu konflik sebagai akibat prasangka dan kecemburuan sosial-ekonomi yang membawa unsur suku, agama, dan ras (SARA). Hal ini juga terjadi pada konflik di daerah lain, misalnya saja kasus konflik Mesuji yang berawal pada 6 November 2010 sebagai akibat perambahan hutan produksi Register 45 dan Alpha 8 oleh suku pendatang (Jawa, Bali dan Bugis) dengan Pamswakarsa (suku Lampung) yang dibentuk oleh PT. Silva Inhutani dan PT. BSMI yang sampai saat ini belum terselesaikan. Selanjutnya konflik terjadi di kecamatan Bekri, kabupaten Lampung Tengah pada 8 Oktober 2012 antara suku Jawa dengan suku Lampung sebagai akibat tindak pidana pencurian. Selain di Bekri, konflik di Lampung tengah juga terjadi di kecamatan Padang Ratu pada 24 Agustus 2013 yang juga melibatkan suku Lampung dan Jawa. Pada tanggal 27-29 Oktober 2013 konflik terjadi di Balinuraga, konflik antar suku ini terjadi antara suku Bali sebagai suku pendatang dengan masyarakat pribumi Lampung, yang kemudian meluas kepada suku-suku yang lainnya. Konflik tidak kunjung reda dan terus menjaral di berbagai wilayah di provinsi Lampung. Konflik terbaru adalah konflik di kecamatan Bunga Mayang kabupaten Lampung Utara pada 2 Februari 2016 dan kecamatan Gunung Terang, kabupaten Tulang Bawang Barat pada 11 Maret 2016, yang keduanya melibatkan suku pribumi dan pendatang.

Faktor toleransi dalam masyarakat majemuk merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi dalam mencapai integrasi sosial. Hal ini mengingat konflik seperti yang terjadi di wilayah Lampung akan mudah terjadi karena disulut oleh kecemburuan dan prasangka-prasangka sosial yang berkepanjangan dan berlarut-larut tanpa disertai pembuktian yang riil. Hal ini sejalan dengan pendapat Gerungan (1966: 175) bahwa prasangka sosial terjadi karena antarkelompok masyarakat (suku) tidak memahami watak dan pola hidupnya, adanya pola ketergantungan sosial (baik perseorangan atau golongan), serta kesadaran akan dampak negatif dari prasangka sosial itu sendiri.

Dalam banyak kasus konflik di Lampung, resolusi konflik yang digunakan cenderung mengadopsi model penyelesaian dari luar budaya

masyarakat itu sendiri. Pelaksanaan resolusi dengan model ini juga seragam, yaitu menghentikan konflik dengan pemaksaan oleh alat negara yang berwenang (*Peace Keeping*) yang kemudian diterapkannya serangkaian aturan beserta sanksinya agar konflik tidak terulang kembali. Pola seperti ini hanya efektif untuk menghentikan konflik dalam waktu singkat tetapi tidak akan menjamin konflik akan reda dalam kurun waktu yang lama. Salah satu domain yang luput dalam penanganan konflik adalah pendekatan dari dalam masyarakat itu sendiri. Karena pada hakikatnya masyarakat memiliki kemampuan dan sensitivitas yang disebut “kearifan lokal” dalam menjaga kelangsungan dinamika masyarakat, termasuk mengantisipasi bahaya yang mengancam, dan menyelesaikan konflik.

Konflik yang didominasi oleh prasangka dan kecemburuan sosial yang berkepanjangan dan telah mendarah daging akan menjadi dendam yang tak kunjung selesai, sehingga hanya karena masalah kecil dapat memicu konflik horizontal maupun vertikal yang lebih luas. Keadaan ini tentu perlu resolusi konflik yang efektif agar akar permasalahan dapat diredam. Setidaknya ada tiga tahapan dalam resolusi konflik, yaitu sebagai berikut (Rozy dkk, 2006: 21).

- (1) Tahap de-eskalasi konflik yang menekankan pada proses penghentian kekerasan secara paksadengan aparat keamanan atau militer.
- (2) Tahap negoisasi, langkah penyelesaian yang lebih berorientasi politik dengan melibatkan kelompok-kelompok yang bertikai untuk bermusyawarah.
- (3) Tahap *problem solving approach* yang lebih bernuansa sosial.

Konflik horizontal yang terjadi di Kecamatan Semaka bila dikaji secara mendalam bukan hanya karena kasus pidana pencurian semata. Kecemburuan dan prasangka sosial telah terakumulasi sebagai “sekam”, karena suku Lampung sendiri semakin tergeser oleh masyarakat suku pendatang karena mayoritas gaya hidup mereka yang penuh dengan gengsi dalam menjalani kehidupan adatnya. Hal ini sesuai dengan pendapat Wirawan.

“Suatu jenis konflik sering kali tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan konflik sejumlah aspek kehidupan. Konflik sosial seringkali tidak hanya disebabkan oleh perbedaan suku, ras, kelas, atau kelompok sosial, tetapi seringkali disebabkan oleh

kecemburuan ekonomi, kehidupan politik, dan perbedaan agama (Wirawan, 2013: 62)”

Keterlibatan unsur suku membuat konflik semakin cepat meluas, dan stereotip negatif antarmasing-masing kelompok masyarakat pun tidak bisa dihindari. Hal ini berdampak pada rusak/terganggunya komunikasi, interaksi, dan relasi sosial antarsuku dan agama. Pada konflik Semaka, unsur kesukuan dilibatkan antara suku pribumi Lampung dengan Suku Jawa pasca terbunuhnya pencuri motor yang merupakan orang bersuku Lampung oleh masyarakat suku Jawa. Keadaan ini memiliki kemiripan alur dan proses dengan konflik Balinuraga di Lampung Selatan yang menghebohkan seluruh penjurur Nusantara pada tahun 2012, ketika terjadi pemusatan enklave-enklave komunitas koloni, kesenjangan perekonomian, dan bahkan terlihat seperti adanya monopoli terhadap suku pribumi, dan arogansi dari satu kelompok komunitas yang menimbulkan stereotip antarkelompok/komunitas/golongan dan menciptakan etnosentrismenya masing-masing. Puncaknya, permasalahan-permasalahan kecil tidak mampu diakomodasi secara kekeluargaan dan mengedepankan perilaku main hakim sendiri (*eighen righting*) (Humaedi, 2014).

Pada hakikatnya, masyarakat suku Lampung sangat terbuka dan ramah terhadap pendatang, walaupun memiliki watak keras dan intonasi bicara yang kasar seperti kebanyakan suku di Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan falsafah hidupnya yang dikenal dengan istilah “*Piil Pesenggiri*” atau yang sering disebut “*Piil*”. Sebagai kekayaan budaya yang tumbuh didalam masyarakat itu sendiri, maka kearifan lokal *Piil Pesenggiri* mempunyai elemen-elemen penting yang mampu mempertebal kohesi sosial diantara warga masyarakat. *Piil Pesenggiri* sendiri merupakan salah satu sendi Pancasila yang merupakan sintesis dari kepribadian (sejarah perjuangan, budaya, agama, dan adat-istiadat) masyarakat Indonesia pada umumnya (MPR RI, 2014: 27-28). Menurut John Haba (dalam Abdullah, 2008), setidaknya ada enam signifikansi dan fungsi kearifan lokal jika dimanfaatkan dalam resolusi konflik. *Pertama*, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. *Kedua*, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan lintas kepercayaan. *Ketiga*, kearifan lokal tidak bersifat memaksa tetapi lebih merupakan kesadaran dari dalam. *Keempat*, kearifan lokal memberi warna kebersamaan sebuah komunitas. *Kelima*, kemampuan *local wisdom* dalam mengubah pola pikir dan

hubungan timbal balik individu dan kelompok dan meletakkannya di atas *common ground*. *Keenam*, kearifan lokal dapat mendorong proses apresiasi, partisipasi sekaligus meminimalisir prasangka sosial yang merusak solidaritas dan integrasi komunitas (Abdullah, 2008).

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi aktualisasi kearifan lokal *Piil Pesenggiri* yang bersinergi dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an dalam rangka resolusi konflik Semaka? Hal ini merupakan strategi alami penanganan konflik sekaligus pencegahan konflik untuk terulang kembali, karena pada hakikatnya setiap masyarakat memiliki pedoman hidup yang berasal dari kearifan lokal, keyakinan, dan rasa kebangsaannya. Menynergikan *Piil Pesenggiri* sebagai kearifan lokal suku Lampung dengan nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an akan memberikan pemahaman kepada masyarakat pribumi dan pendatang bahwa hakikatnya karakter kehidupan mereka memiliki “titik temu” dan dapat hidup berdampingan satu sama lain, bahkan saling mengisi.

Penelitian deskriptif kualitatif ini menarik karena mengangkat kearifan lokal masyarakat suku Lampung yang sejatinya adalah “tuan rumah” di daerahnya sendiri tetapi terpojokkan oleh masyarakat pendatang sehingga muncul kecemburuan sosial. Begitupun sebaliknya. Suku pendatang, terutama suku Jawa, memiliki prasangka sosial (buruk) terhadap suku pribumi Lampung karena sering “reseh” dan mengintimidasi. Metode penelitian yang digunakan adalah *Ex Post Facto*, yang merunut latar belakang konflik Semaka hingga pada resolusinya, dengan mengaitkannya pada sudut pandang budaya, keyakinan dan nasionalisme. Pengambilan data dilakukan dengan menyertakan berbagai sumber informasi yang berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi.

Subjek penelitian atau informan ditentukan secara terpilih dan dengan teknik *snowball sampling*. Informan yang memiliki pemahaman tentang masalah dalam penelitian ini dipilih langsung oleh peneliti, dan untuk beberapa kajian materi yang lain yang informan tidak pahami, maka akan dirujuk pada informan lain yang lebih berkompeten. Adapun informan tersebut berjumlah 8 orang yang terdiri 6 orang dari pemuka masyarakat/tokoh adat di Kecamatan Semaka, khususnya Bapak Drs. H.

Mz, M.Ag. (gelar adat: Khadin Darmawan) selaku tokoh masyarakat adat suku Lampung Pesisir, dan Bapak Md selaku tokoh masyarakat suku Jawa di Kecamatan Semaka. 1 orang budayawan daerah yang dalam hal ini adalah Ibu Dr. FA, M.Pd selaku Ketua Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Lampung Universitas Lampung sekaligus pengurus Majelis Penyimbang Adat Lampung (MPAL) provinsi Lampung. Dan 1 orang Aparatur pemerintahan Kecamatan Semaka sebagai salah satu mediator penyelesaian konflik yaitu Ibu RK selaku sekretaris Kecamatan Semaka.

Agar data yang disajikan menjadi lebih bermakna dan mudah dipahami, maka analisis data yang digunakan adalah *Analysis Interactive Model* dari Miles dan Huberman. Data wawancara mendalam, observasi tempat kejadian perkara dan dokumentasi perjanjian/kesepakatan, pemberitaan media massa, kebijakan pemerintah, dan sebagainya yang telah dikumpulkan tersebut direduksi sehingga menjadi sederhana dan mudah diabstraksikan. Setelah itu, data disajikan secara jelas agar mudah dipahami dan sejalan dengan rumusan masalah. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan (verifikasi) untuk menguji kebenaran dan kecocokan sebagai bentuk validasinya.

Kronologi Konflik di Kecamatan Semaka

Konflik di Kecamatan Semaka terjadi antara masyarakat suku Lampung di Pekon Way Kerap, Karang Agung, dan Pardawaras dengan masyarakat suku Jawa dari Pekon Sukaraja. Konflik di Kecamatan Semaka dilatarbelakangi oleh tindak pidana pencurian yang berujung pada tindakan main hakim sendiri. Keluarga korban yang bersuku Lampung tidak terima dan mengerahkan massa untuk melakukan penyerangan di Pekon Sukaraja. Kejadian ini hanya merupakan pemicu saja, sedangkan bibit konflik sudah terakumulasi sejak lama. Kesenjangan ekonomi dan kecemburuan sosial suku Lampung diduga menjadi dasar (*background*) beberapa konflik yang terjadi di Lampung. Hal dibuktikan dengan aksi 'jarah', politik uang, dan politik identitas yang dilakukan para pelaku konflik (wawancara dengan MD, tokoh masyarakat suku Jawa tanggal 12 April 2015). Runtutan kejadian konflik Semaka secara rinci adalah sebagai berikut.

“Konflik di Sukaraja, Kecamatan Semaka diawali ketika masyarakat pekon Tugu Papak menunaikan ibadah Sholat Magrib dan salah satu warga suku Jawa memarkir

kendaraannya di Masjid. Ketika ibadah Sholat Magrib berlangsung, Syahyani (30 tahun) warga suku Lampung yang dari pekon Karang Agung mencuri motor yang terparkir tersebut bersama rekannya. Setelah mengetahui kendaraannya hilang, pemilik langsung menghubungi beberapa warga dipertbatasan desa Sukaraja untuk mengejar dan menangkap orang yang mencuri motornya. Dengan kerjasama warga pekon Sukaraja, Syahyani yang membawa motor curian tersebut tertangkap. Namun, dia sempat kabur dan bersembunyi kerumah salah satu warga Pekon Sukaraja bernama Japan. Karena panik tanpa sadar Japan mengizinkan pencuri untuk bersembunyi di kamarnya. Namun, istri Japan yang tidak paham dengan kejadian itu kaget dan berteriak melihat ada laki-laki dikamarnya. Spontan, para warga yang sedang mengejar pencuri masuk kedalam rumah dan menyeret pencuri tersebut ke halaman serta menghakiminya hingga tewas dan bahkan salah seorang warga berteriak dan menghujat dengan kalimat yang berunsur SARA bahwa **‘itu adalah orang Lampung, maka dibakar saja’**. Saat bersamaan, Reval warga suku Lampung dari pekon Pardawaras melintas di tempat tersebut, warga pun mengira Reval merupakan bagian dari komplotan pencuri itu padahal Reval tidak ada kaitan dengan pencurian. Reval pun dihakimi hingga babak-belur. Teman pelaku pencurian yang tidak tertangkap menyaksikan kejadian itu dan mengadukan kejadian tersebut ke warga pekon Way Kerap, Pardawaras, dan Karang Agung dengan cerita yang didramatisasi dan mengandung unsur provokatif (seperti mengatakan bahwa rekannya dan Reval dimutilasi dan dibakar hidup-hidup). Setelah mendengar kabar itu, warga Way Kerap, Pardawaras, dan Karang Agung marah dan mengajak suku Lampung di Pekon lain untuk menyerang warga Jawa di Pekon Sukaraja. Warga suku Lampung pun beramai-ramai **merusak dan menjarah** rumah-rumah warga suku Jawa, dan untuk menghilangkan bukti penjarahan, mereka membakar rumah-rumah tersebut. Itu terjadi hari rabu tanggal 30 Juli 2014 pukul 19.00 WIB (serangan pertama), pukul 21.00 WIB (serangan kedua) dan Kamis 31 Juli 2014 pukul 02.00 WIB (serangan ketiga)” (Wawancara dengan RK, seorang aparatur pemerintahan Kecamatan Semaka, tanggal 23 Maret 2015).

Pernyataan ini didukung pernyataan MD tokoh masyarakat suku Jawa, berdasarkan hasil

wawancara tanggal 12 April 2015 yang menyatakan bahwa:

“Persinggungan kepentingan antarsuku dalam masyarakat yang beragam seperti disini (Kecamatan Semaka) sering kali tidak dapat terhindarkan. Mungkin hal ini karena kecemburuan sosial suku Lampung terhadap suku pendatang termasuk suku Jawa ataupun sebaliknya yang telah lama terpendam. Faktor-faktor penyebabnya antara lain pemukiman yang berkelompok-kelompok dan kurangnya komunikasi antar suku serta timpangnya keadaan ekonomi. Buktinya, dalam konflik kemarin rumah masyarakat banyak yang dijarah harta bendanya. Tindakan massa pekon Sukaraja yang menghakimi memang tidak dapat dibenarkan karena seharusnya ada aparat pemerintah yang lebih berwenang (kepolisian). Namun, masyarakat di Kecamatan Semaka ini sudah geram dengan tindakan kriminal yang beberapa diantaranya dilakukan oleh masyarakat suku Lampung. Kami sadar tidak semua suku Lampung seperti itu. Suku pendatang pun banyak yang menjadi pelaku tindakan kriminal. Tetapi dari beberapa kasus yang terungkap, mayoritas pelakunya adalah suku Lampung (Wawancara dengan MD, seorang tokoh masyarakat suku Jawa, tanggal 23 Maret 2015)”.

Latar belakang konflik terjadi murni karena tindakan pidana pencurian motor yang meluas pada aksi kerusuhan dan penjarahan yang melibatkan suku Lampung dengan suku pendatang dari Jawa. Tindakan pidana pencurian tersebut hanya sebagai pemicu konflik, sedangkan bibit konflik telah ada sejak lama. Prasangka sosial masing-masing suku membuat mereka tidak lagi dapat menyelesaikan masalah dengan musyawarah tetapi justru dengan main hakim sendiri. Suku Lampung berprasangka bahwa suku pendatang telah menggeser kehidupan ekonomi mereka, karena banyak suku Jawa yang lebih sukses dari pada suku Lampung. Hal ini didukung pernyataan seorang pemuka adat suku Lampung, bahwa:

”Suku Lampung mayoritas bekerja pada sektor perkebunan, baik itu adalah durian, duku, lada, karet, kelapa, kopi dan cokelat. Komoditi inilah yang menjanjikan nilai ekonomi yang tinggi. Walaupun panennya musiman, mengurus tanaman perkebunan itu tidak sesulit mengurus tanaman padi sawah baik dari segi pupuk dan pencegahan hama. Umur tanaman perkebunan juga lebih lama dan bisa berkali-kali panen berbeda dengan tanaman padi yang hanya sekali

panen dan harus menanam lagi. Secara ekonomi tanaman perkebunan lebih murah perawatan dari pada tanaman pertanian. Tanah di Kecamatan Semaka ini kan berbukit jadi tidak cocok untuk pertanian persawahan. Mengelola tanaman pertanian membutuhkan tenaga *ekstra*, mulai dari membajak, menanam, memupuk, mencegah hama dan memanen. Kami juga tidak memiliki cukup pengetahuan untuk bertani padi sawah. Kalaupun ada yang bertani padi itu padi *gogo* atau tadah hujan. Disisi lain ada suatu rasa malu (*pil*) bagi masyarakat suku Lampung untuk melakukan pekerjaan yang kasar walaupun itu halal misalnya menjadi buruh dan kuli (Wawancara dengan MZ (Gelar Adat: Khadin Darmawan), seorang pemuka adat suku Lampung Pesisir, tanggal 23 Maret 2015)”.

Kegiatan ekonomi suku Lampung mayoritas berada pada sektor perkebunan dan pengolahan hasil hutan. Perkebunan yang dikembangkan suku Lampung di Kecamatan Semaka antara lain kelapa, kopi, cokelat, durian, duku, lada, dan karet. Dari sektor pengolahan hasil hutan yang dikembangkan suku Lampung antara lain rotan, nira, dan sengon. Mereka berasumsi bahwa komoditi perkebunan memiliki harga yang relatif lebih tinggi dari pada komoditas pertanian. Bagi masyarakat suku Lampung berkebun juga lebih minim perawatan dan bisa lebih *santai* mengelolanya karena tidak perlu membajak dan menanam kembali setelah panen. Kelemahannya adalah tanaman perkebunan hanya panen secara musiman sekali dalam setahun ketika tanaman perkebunan belum memasuki masa panen keadaan ekonomi mereka tentu akan terpengaruhi. Selama menunggu masa panen perkebunan pemenuhan kebutuhan ekonomi akan sulit. Suku Lampung juga hanya mengandalkan perkebunan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, sedangkan untuk bertani hanya mengandalkan padi tadah hujan (*gogo*).

Konflik di Semaka yang melibatkan suku Lampung dan Jawa sebenarnya tidak perlu terjadi, karena pada hakikatnya mereka diikat oleh persamaan keyakinan yang mengajarkan persaudaraan sesama mukmin. Dari 22 pekon (desa) di Kecamatan Semaka dengan penduduk 46.929 jiwa, 31,14% merupakan masyarakat pribumi Lampung yang keseluruhannya beragama Islam. Selanjutnya, 54,36% merupakan masyarakat suku Jawa yang 99,8% penduduknya beragama Islam dan 0,2% beragama Kristen dan Katolik (monografi Kecamatan Semaka, 2015: 7-11).

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (١٠)

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang Mukmin adalah bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudara kalian, dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmat”.

Sebagai agama mayoritas, hakikatnya Islam mengajarkan bahwa sesama muslim itu bersaudara, seperti yang difirmankan Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 10.

Selain itu, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* sendiri telah mempraktikkan perilaku menghormati antarumat beragama, salah satunya ketika memberikan penghormatan (bangun/berdiri) kepada jenazah orang Yahudi ketika melintas didekatnya (Al-Bukhori, no 1311). Hal ini mengisyaratkan bahwa kita harus saling hormat-menghormati sesama manusia. Setidaknya jika tidak bisa bersaudara secara persamaan keyakinan dan suku maka dapat mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sebagai sesama ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Prasangka-Prasangka Sosial Kedua Belah Pihak

Dalam sudut pandang suku Lampung, kesuksesan kegiatan ekonomi suku pendatang dianggap memonopoli perekonomian suku pribumi Lampung yang berdampak pada pengalihan asset (harta benda) secara besar-besaran dalam waktu yang relatif singkat, sehingga memaksa mereka seperti “tamunya dirumahnya sendiri”. Hal ini ditunjang penafsiran yang salah tentang *Piil* (harga diri) yang diidentikan sebagai *gengsi* kehidupan adat yang gemar dipuji berlebihan dalam hal kekayaan, kejayaan, hingga status sosial budaya. Hal itu membuat sebagian besar masyarakat suku Lampung tidak segan-segan mengeluarkan biaya tinggi untuk memenuhinya, walaupun harus menjual harta bendanya. Keadaan seperti ini lambat laun memupuk kecemburuan sosial-ekonomi antarsuku dan membuat suku Lampung termotivasi untuk mengintimidasi suku pendatang, khususnya Jawa, yang tentu saja sangat berpotensi melunturkan nilai-nilai toleransi dan menimbulkan konflik yang luas.

Keadaan ini membuat keadaan ekonomi suku Lampung tertinggal oleh suku pendatang yang lebih berinovasi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Mereka cenderung akan menjual asset modalnya untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendesak. Keadaan ini juga dipengaruhi rasa malu/*gengsi* (*piil*) masyarakat suku Lampung dalam melakukan pekerjaan yang berat dan

kasar, seperti buruh dan kuli yang diidentikan dengan bertani sawah. Pandangan sebagian besar masyarakat suku Lampung bahwa seseorang yang bergelar adat tinggi rasanya malu kalau harus mencangkul dan memupuk padi di sawah layaknya seorang buruh karena seolah-olah tidak punya uang untuk memperkerjakan orang lain.

Hal ini didukung hasil penelitian Rusydi yang mengatakan bahwa mata pencaharian pertama suku Lampung adalah berladang dengan menanam padi tadah hujan secara berpindah-pindah. Kemudian mereka mengenal berkebun tanaman keras, seperti lada, kopi, dan kelapa. Sistem bertani sawah tidak dikenal oleh suku Lampung sebelum adanya transmigrasi sehingga hasil bertani padi tadah hujan sangat bergantung pada alam dan tidak sebesar bertani padi sawah (Rusydi, 1986: 30). Selain bertani, suku Lampung juga memelihara ternak, seperti unggas dan kerbau, tetapi mereka tidak/jarang memelihara kambing dan sapi karena harus merumput (*ngarit*) dan itu mempengaruhi gengsinya. Padahal beternak kambing dan sapi adalah bentuk upaya menabung bagi masyarakat petani/perdesaan untuk menyiasati kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Mereka juga menangkap ikan di danau atau sungai tetapi jarang menangkap ikan di laut.

Keadaan ini berkebalikan dengan suku pendatang yang rela hidup sederhana demi mencapai kesuksesan di tanah perantauan. Walaupun tidak menutup kemungkinan suku pendatang juga memiliki *gengsi* yang sama, tetapi semangat hidup ditanah rantau membuat mereka lebih efektif dan efisien dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bertani sawah merupakan keterampilan hidup suku Jawa dan Bali yang telah diwariskan turun temurun yang terus dikembangkan di daerah transmigrasi. Lahan miring/bergelombang dibuat areal pertanian dengan teknik *sengkedan*.

Suku Jawa dan Bali membuktikan bahwa tanah Semaka juga cocok untuk pertanian. Pemerintah pun memfasilitasinya dengan membangun bendungan dan irigasi untuk menunjang persawahan ini. Sebelum ada irigasi, untuk meningkatkan ekonomi masyarakat, setelah panen padi lahan ditanami tanaman palawija seperti jagung dan

singkong. Setelah ada irigasi, petani bisa panen dua hingga tiga kali setahun karena ada sistem *gadu* dan tetap bisa menanam palawija dan kesejahteraan petani pun meningkat. Adanya irigasi sangat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat karena areal persawahan bertambah luas dan panen padi yang dihasilkan dapat berlipat ganda dalam setahun.

Suku Jawa di Kecamatan Semaka juga merupakan pelopor bagi terbentuknya pasar sebagai pusat perekonomian rakyat dan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Di Pekon yang mayoritas masyarakatnya suku Jawa pasti ada pasar sebagai tempat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain membuka lapangan pekerjaan baru sebagai pedagang, pasar juga memungkinkan masyarakat mendapatkan barang dan jasa kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah karena tidak ada monopoli. Masyarakat suku lain juga terbantu dengan adanya pasar ini karena distribusi dan penjualan hasil perkebunan maupun pertanian, hasil laut, serta kebutuhan sehari-hari seperti sayur mayur dari berbagai macam suku dapat terjadi dengan mudah di pasar. Untuk meningkatkan penghasilan, masyarakat suku Jawa dan Bali juga mau belajar berkebun dengan menjadi buruh pemelihara dan pemanen kopi dan lada pada perkebunan masyarakat suku Lampung yang pada akhirnya diaplikasikan sendiri pada kebun mereka sendiri yang di beli dari masyarakat suku Lampung. Perkebunan dijadikan mata pencaharian tambahan untuk meningkatkan taraf ekonomi. Tanaman yang dikembangkan di perkebunan oleh masyarakat suku Jawa antara lain kopi, lada, karet, dan cokelat.

Keadaan ini lambat laun semakin memupuk stereotip perekonomian negatif suku Lampung yang dalam konflik ini dibuktikan dengan penjarahan yang dilakukan suku Lampung terhadap rumah-rumah suku Jawa saat kerusuhan terjadi. Ikatan kekeluargaan persaudaraan antarsuku Lampung serta prasangka sosial mereka terhadap suku pendatang, khususnya Jawa, membuat mereka tidak menghiraukan lagi kebenaran. Perbuatan salah tapi karena dilakukan kepada orang diluar suku Lampung tetap dibenarkan, dibela, dan dilindungi.

Sementara itu, suku Jawa berprasangka bahwa suku Lampung selalu diidentikan dengan premanisme walaupun tidak semua suku Lampung adalah pembegal, pencuri, dan pemalak. Hanya karena perilaku segelintir orang suku Lampung,

stereotip negatif disematkan kepada keseluruhan masyarakat suku Lampung. Padahal, suku pendatang juga ada yang menjadi pembegal, pencuri dan pemalak. Provokasi berupa teriakan dan hujatan berunsur SARA bahwa 'itu adalah orang Lampung, maka dibakar saja' dalam kerusuhan itu merupakan bukti stereotip negatif sebagian besar masyarakat suku Jawa terhadap suku Lampung. Ikatan persaudaraan dan rasa senasib sepenanggungan antarsuku pendatang, khususnya suku Jawa, serta prasangka sosial terhadap suku Lampung membuat mereka melupakan azas praduga tak bersalah dan musyawarah/ *rembuk pekon* dalam penyelesaian suatu masalah.

Proses kehidupan kolektif sosial masyarakat pun bergeser dari masyarakat *Gemeinschaft* yang dahulu hubungan antaranggota masyarakat yang berbeda suku diikat oleh hubungan kesatuan batin yang murni. Dahulu suku Lampung suka menolong sebagian masyarakat Jawa untuk bertahan hidup ditanah rantau dengan menggarap lahan yang dimiliki oleh masyarakat suku Lampung, bahkan tidak segan-segan mengangkat saudara. Kini kehidupan sosialnya telah berubah menjadi masyarakat *Gesselschaft* seiring majunya perekonomian masyarakat pendatang dan kepemilikan lahan yang luas. Suku Jawa merasa telah bisa mandiri dan "tidak membutuhkan" suku Lampung lagi untuk bertahan hidup di tanah perantauan. Bahkan hubungan sosial ekonominya pun telah berubah. Suku Jawa yang dulu posisinya adalah sebagai pekerja kini menjadi pemilik lahan.

Resolusi Konflik: Aktualisasi Nilai-nilai *Piil Pesenggiri* dalam Perspektif Keagamaan dan Pancasila

Piil Pesenggiri merupakan suatu falsafah hidup suku Lampung yang menegaskan bahwa mereka memiliki harga diri yang harus dipertahankan. Falsafah ini tertuang dalam Kitab *Kuntjara Radja Niti* yang merupakan kitab pedoman kehidupan adat masyarakat suku Lampung (Ariyani, 2014). Hadikusuma dan Rizani sebagaimana dibahas Ariyani mengungkapkan bahwa *Piil Pesenggiri* adalah nilai-nilai dasar yang dijadikan pegangan pokok masyarakat suku Lampung (Ariyani, 2014: 16). Hal ini tercantum dalam kalimat di bawah ini.

"Tando nou ulun Lappung, wat Pi'il Pesenggiri, yaou balak Pi'il ngemik malou ngigau diri ualah nou bejuluk you beadek, iling Mewari ngejuk ngakuk nemui nyimah ulah nou padau you nengah you nyappur,

nyubadi jejamou, begamiy balak, sakai sambayan”.

Terjemahannya:

Tandanya orang Lampung, ada *Piil Pesenggiri*, ia berjiwa besar, mempunyai malu, menghargai diri karena lebih bernama besar dan bergelar. Suka bersaudara, beri memberi terbuka tangan. Karena pandai, ia ramah suka bergaul. Mengolah bersama pekerjaan besar dengan tolong menolong.

Piil Pesenggiri sangat kental dengan nilai-nilai ke-Islam-an, mengingat penyebaran agama Islam pada suku Lampung dilakukan secara vertikal dengan menaklukkan dan mengislamkan suku Tumi pimpinan Ratu Sekarmong yang sebelumnya beragama Hindu Bairawa (Sujadi, 2013: 6). *Invasi dan Islamisasi* ini dilakukan oleh empat orang putra kerajaan Pagaruyung dari Minangkabau, yaitu Umpu Bejalan Di Way, Umpu Belunguh, Umpu Nyerupa, dan Umpu Pernong. Mereka telah membuat perubahan besar pada tatanan sosial budaya dan keyakinan masyarakat suku Lampung.

Selain itu, faktor tersebut juga ditunjang dengan hubungan persaudaraan suku Lampung terdahulu dengan Fatahillah (Sunan Gunung Djati). Hubungan ini terjalin karena Sunan Gunung Djati menikahi Putri Sinar Alam (anak Ratu Pugung) ketika menyebarkan Islam di wilayah Labuhan Maringgai, dan kelak menurunkan Radin Inten sebagai penyebar agama Islam di wilayah pesisir (termasuk Kecamatan Semaka) sekaligus Pahlawan Nasional Lampung dalam melawan penjajahan Belanda. Kedua hal ini menjadi faktor utama dari lahirnya tatanan hidup bermasyarakat berdasarkan syariat Islam yang dituangkan dalam *Piil Pesenggiri* yang terus dilestarikan hingga saat ini.

Piil Pesenggiri memiliki makna bahwa demi harga diri, maka suku Lampung pantang menyerah dan tidak mau kalah dalam sikap, tindakan, dan perilaku. Prinsip ini tentu saja dilandasi dengan konsep ‘berani karena benar dan takut karena salah’. *Piil Pesenggiri* merupakan sistem nilai dan pandangan hidup tertinggi dalam kebudayaan Lampung. *Piil Pesenggiri* pada hakikatnya menuntun masyarakat Lampung untuk mempunyai kebijaksanaan dalam berpikir dan bertindak. *Piil Pesenggiri* sendiri terdiri dari empat pilar yang saling menopang, yaitu *Juluk-Adek*, *Nemui Nyimah*, *Nengah Nyappur*, dan *Sakai Sambayan*.

Kalau masyarakat suku Lampung telah memenuhi keempat unsur tersebut barulah bisa dikatakan mereka memiliki *Piil Pesenggiri*. Dalam perspektif positif, *Piil Pesenggiri* merupakan pemahaman dari rasa malu (*Piil*) terhadap suatu kesalahan serta harga diri (*Pesenggiri*) dalam membela kebenaran. Jati diri masyarakat suku Lampung akan utuh bila telah memenuhi semua pilar dalam *Piil Pesenggiri*. Semakin tinggi gelar adat (*Juluk-Adek*) yang disandangnya maka sikap, perilaku, dan harga dirinya juga semakin dijaga dalam kehidupan bermasyarakat. Mereka akan merasa malu (*Piil*) bila gelarnya tinggi tetapi sikap dan perilakunya buruk. Masyarakat suku Lampung akan merasa bangga bila dapat memuliakan tamu (*Nemui-Nyimah*), walaupun terkadang mengada-adakan yang tidak ada. Tujuannya agar tamu merasa dihormati karena mereka akan merasa malu (*Piil*) bila tidak dapat memuliakan tamu. Masyarakat suku Lampung akan senang dapat bergaul dengan berbagai kalangan tanpa perbedaan (*Nengah-Nyappur*) karena mereka akan merasa malu (*Piil*) bila tidak bisa bergaul. Masyarakat suku Lampung akan senang dan bangga dapat berperan aktif dalam kemajuan daerah yang ditempatinya (*Sakai-Sambayan*) karena mereka akan merasa malu (*Piil*) bila tidak berperan dalam kehidupan bermasyarakat.

Dalam kaitannya dengan Pancasila dan nilai ke-Islam-an, maka tentu akan dipahami suatu materi yang utuh dan sistematis dari makna resolusi konflik Semaka. Menurut Pernong (2016: 12), sudut pandang sila pertama terhadap konflik Semaka mengisyaratkan bahwa Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa merupakan *causa prima* yang tidak terbagi, terjabarkan menjadi sebuah dasar dari segala bentuk pandangan hidup/falsafah, serta menjadi sumber dari segala kebenaran. Oleh karena itu, berkaitan dengan prasangka/tuduhan sosial yang menggeneralisasi suatu kelompok/etnis dan bahkan menghakimi secara sepihak, serta kecemburuan sosial yang menghalalkan segala cara untuk melampiaskannya tentu mejadi bagian dari larangan Tuhan.

Sudut pandang sila kedua terhadap konflik Semaka tercermin dalam falsafah *Nemui Nyimah* yang memiliki makna bahwa masyarakat suku Lampung saling hormat menghormati, saling menghargai, dan sadar akan kedudukannya baik sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa maupun makhluk sosial-budaya. Implikasinya adalah falsafah *Nemui Nyimah* akan menjaga

harmoni kehidupan sosial karena setiap individu saling menghormati dan menghargai kedudukannya dalam masyarakat adat. Falsafah ini merupakan

cerminan dari syariat Islam, salah satunya difirmankan oleh Allah SWT dalam QS. Al-Hujurat ayat 11.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ
وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا
تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ
فَأُولَٰئِكَ هُم الظَّالِمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”.

Nemui Nyimah berlaku untuk siapa saja, bahkan dengan orang-orang dengan non muslim. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8.

لَا يَنْهَىٰكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُواكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن
تَبْرُوهُمْ وَتَقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”.

Dengan falsafah *Nemui Nyimah*, maka terciptalah suatu batasan yang beradab di antara individu di masyarakat, baik dengan dasar syariat Islam maupun hukum adat. Hal ini tentu bermakna bahwa dendam dan permusuhan antara suku Lampung dan Jawa merupakan perbuatan yang keji dan tidak menghargai hak dan kewajiban orang lain sebagai cermin keberadaban sebagai manusia. Pengangkatan saudara (*angon muakhi*) pada suku pendatang akan menimbulkan pengakuan/kesetaraan terhadap suku pendatang sekaligus menjadi lebih leluasa bergaul. Sebagai suku pendatang, masyarakat Jawa pun menerima gelar yang diberikan. Hal tersebut berakibat pada menguatnya eksistensinya di Lampung sebagai tanah perantauan. Panggilan *Adek* yang diberikan kepada suku Jawa akan mengikat tali persaudaraan bagi suku pendatang untuk dapat hidup rukun dan damai. Kebiasaan-kebiasaan tertentu yang dianggap tabu oleh kedua belah pihak akan lebih mudah dipahami dan ditoleransi setelah satu sama lain menjadi bagian dari masyarakat adatnya. Hal ini akan menumbuhkan rasa saling menghargai dan

menghormati yang bermuara pada tumbuhnya kepercayaan sosial (*social trust*) kedua belah pihak.

Sudut pandang sila ketiga terhadap konflik Semaka tercermin dalam falsafah *Nengah Nyappur* yang memiliki makna bahwa sebagai makhluk yang berkemanusiaan dan beradab, masyarakat suku Lampung sangat terbuka dalam bergaul, gemar bersilaturahmi, dan menerima tamu. Falsafah ini merupakan cerminan syariat Islam, Allah SWT berfirman dalam QS. Surat An-Nisa ayat 2 yang artinya:

“hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isterinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”

Selanjutnya, dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya:

“Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia menyambung silaturahmi” (HR. Al-Bukhari no. 6138).

Suku Lampung aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan akan merasa sangat malu bila tidak ikut berpartisipasi langsung dalam kegiatan kemasyarakatan. Hal ini mengindikasikan hubungan yang ‘guyub’ antarwarga sebagai satu kesatuan yang memiliki sejarah perasaan senasib sepenanggungan akibat penjajahan. Konflik Semaka telah mencerminkan retaknya sendi persatuan dan kesatuan bangsa yang dahulu juga dilakukan Belanda dengan politik *divide at impera*. Falsafah *Nengah Nyappur* memungkinkan tali silaturahmi antara masyarakat yang berbeda suku semakin dekat dengan ikatan perkawinan. Seorang pendatang dapat menikah dengan orang suku Lampung (*Amalgamasi*) dengan terlebih dahulu di-Lampung-kan melalui serangkaian proses adat. Dengan eratnya ikatan silaturahmi ini maka konflik dapat dihindarkan karena ikatan persaudaraan.

Sudut pandang sila keempat terhadap konflik Semaka selaras dengan falsafah *Juluk-adek* yang memiliki makna bahwa persatuan masyarakat suku Lampung harus dipimpin oleh orang yang berhikmah dan bijaksana yang ditandai dengan gelar adat yang disandangnya. Gelar adat suku Lampung dapat berupa spirit kolektivisme (*Saibatin*) maupun demokratis (*Pepadun*)—khusus masyarakat suku Lampung di Kecamatan Semaka bersifat kolektivisme. Spirit kolektivisme maupun demokratis, keduanya sama-sama menjadi pilar nilai-nilai Pancasila dan ke-Islam-an dalam kehidupan masyarakat Lampung. Gelar (*adek*) diberikan seseorang sebagai penghargaan atas kewajiban yang

dilaksanakannya. Gelar *Adek* ini tidak diberikan secara sembarangan melainkan harus diberikan kepada orang yang memiliki hikmah dan bijaksana yang dalam masyarakat *Saibatin* salah satu kriterianya berdasarkan keturunan atau orang yang berjasa pada masyarakat Lampung. Tingkatan gelar dalam suku Lampung di Kecamatan Semaka, berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 23 Maret 2015 dengan MZ (gelar adat: Khadin Darmawan), seorang tokoh adat masyarakat suku Lampung, adalah sebagai berikut.

- | | | |
|----------------------------|---|-----------------------------------|
| 1. <i>Tumenggung</i> | } | <i>Penyimbang</i>
(Kelas Atas) |
| 2. <i>Suntan/ Sultan</i> | | |
| 3. <i>Pengikhan</i> | | |
| 4. <i>Dalom</i> | | |
| 5. <i>Batin</i> | | |
| 6. <i>Khaja</i> | | |
| 7. <i>Khadin</i> | } | <i>Punggawa</i>
(Kelas Tengah) |
| 8. <i>Minak</i> | | |
| 9. <i>Kimas</i> | | |
| 10. <i>Mas</i> | | |
| 11. <i>Layang</i> | } | Rakyat Biasa |
| 12. <i>Cachekek Galing</i> | | |

Gelar *Adek* ini diberikan dengan pertimbangan status atau kedudukan yang bersangkutan dalam keluarga batih/inti berdasarkan ikatan darah dan mengacu pada *Adek* bapak atau kakeknya dalam adat secara geneologis. Orang yang bergelar adat tinggi harus mampu menjadi pemimpin yang bertanggung-jawab, karena dia merupakan pengayom gelar adat dibawahnya. Falsafah ini merupakan cerminan dari syariat Islam, salah satunya yang difirmankan Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 59.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ لَنْ نَنْزِعَهُمْ فِى شَيْءٍ فَرْدُوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta’atilah Allah dan ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Hal ini juga ditegaskan kembali dalam QS. As-Sajdah ayat 24.

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا
بِمَا نُنزِّلْنَا يُوقِنُونَ ﴿٢٤﴾

Artinya: “Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat Kami”

Adek merupakan suatu simbol kepemimpinan yang difragmentasikan dalam sebuah kata/kalimat sebagai makna kepemimpinan pemiliknya. Pasca-konflik di Kecamatan Semaka, falsafah *Bejuluk Beadek* digunakan untuk mendamaikan dua suku yang berkonflik. Pendekatan persuasif untuk menyelesaikan masalah dilakukan terlebih dahulu kepada para penyimbang adat suku Lampung dengan musyawarah yang melibatkan pihak-pihak yang bertikai serta fasilitator dari pemkab Tanggamus, Dandim 0424 Tanggamus, dan Polres Tanggamus. Demi memelihara nilai-nilai yang terdapat dalam gelar tersebut dan mengimplementasikannya dalam perilaku-perilaku yang positif, maka para pemimpin adat akan bermusyawarah dengan arif dan bijaksana serta saling memaafkan.

Berkomunikasi dengan penyimbang adat akan lebih mudah dibandingkan dengan masyarakat secara langsung karena *Adek* yang dimilikinya membuat ucapannya lebih dihormati dan mudah dipahami oleh masyarakat adatnya. Suku Lampung yang bergelar adat tinggi memiliki rasa malu bila melakukan perbuatan tercela karena ia merupakan panutan masyarakat adatnya. Komunikasi

dengan pemuka/tokoh adat Lampung dalam resolusi konflik cenderung lebih mudah dari pada kepada masyarakat suku Lampung secara umum. Kedudukan pemuka adat yang memiliki gelar adat tinggi tentu memiliki konsekuensi kepatuhan dari masyarakat adatnya. *Adek* yang dimiliki pemuka adat merupakan sumber motivasi pemiliknya dalam bersikap untuk mampu membimbing dan mengayomi masyarakatnya. Tindakan ini efektif meredakan konflik, karena dengan merangkul pemimpin masyarakat suku yang berkonflik maka masyarakat dibawahnya akan turut serta berdamai. Tumbuhnya penghargaan suku Lampung terhadap Jawa dan juga sebaliknya akan memelihara harmonisasi kehidupan dan menganggap konflik yang terjadi sebagai bagian dari dinamika sosial yang memiliki sisi positif (*conflict paradoks*).

Sudut pandang sila kelima terhadap konflik Semaka tercermin dalam falsafah *Sakai Sambayan* yang memiliki makna bawa masyarakat suku Lampung suka tolong menolong dan bergotong-rotong. Falsafah ini juga merupakan cerminan syariat Islam. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “... dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”

Berkaitan dengan *Sakai Sambayan*/gotong royong, Rasulullah SAW juga bersabda, yang artinya:

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah Azza wa Jalla memudahkan baginya (dari kesulitan) di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang Muslim, maka Allah akan

menutup (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya” (HR. Muslim no 2699).

Keadilan sosial merupakan puncak dari tujuan empat sila yang lain. Orang yang berkumpul (bermusyawarah) untuk bermufakat tentu tujuannya untuk menciptakan keadilan sosial. Dalam hal ini, untuk mewujudkannya perlu saling tolong menolong dan bergotong royong antarwarga masyarakat. Dalam resolusi konflik Semaka, ketimpangan sosial-ekonomi suku Lampung dan Jawa pascakonflik diharapkan

semakin sempit seiring tumbuhnya kepercayaan sosial (*social trust*) antar suku dalam menjalin kehidupan ekonomi. Suku Lampung dan Jawa diharapkan mampu menjadi mitra yang baik dalam berbagai sektor kehidupan. Bergotong royong sangat bermakna untuk mempererat *ukhuwah*, ketika sesama muslim merupakan sebuah sistem yang saling membutuhkan dan tidak bias dipisahkan. Sakit salah satu bagian maka bagian yang lain juga turut merasakannya.

Falsafah yang keempat ini merupakan *treatment* terakhir dalam penanganan konflik. Pascakonflik di Semaka, Falsafah *Sakai Sambayan* dipraktikkan untuk menjaga kelangsungan silaturahmi. Masyarakat suku Lampung dan suku Jawa bergotong royong dalam kegiatan-kegiatan umum, seperti pembangunan tempat ibadah, kerja bakti desa/kecamatan, dan bahkan ketika ada masyarakat suku Lampung atau Jawa

yang menyelenggarakan hajatan, mereka akan saling membantu (*rewang*). *Sakai-Sambayan* menuntut partisipasi langsung dari suku Lampung dan suku pendatang untuk tolong menolong dan bergotong royong.

Piil Pesenggiri merupakan kearifan lokal yang memiliki nilai karakter untuk dijalankan dalam kehidupan adat suku Lampung dalam bergaul baik dengan sesama suku Lampung maupun dengan suku yang lainnya. *Piil Pesenggiri* merupakan pedoman moral dalam pergaulan serta *filter* kebudayaan dalam menghadapi modernisasi dan globalisasi yang disintesiskan dalam sebuah falsafah Pancasila bersama kearifan lokal daerah lain dan nilai-nilai ke-Islam-an. Adapun menurut Ariyani (2014: 79), nilai karakter yang terkandung dalam *Piil Pesenggiri* adalah sebagai berikut.

Tabel 1
Definisi Pilar dan Nilai Karakter pada *Piil Pesenggiri*

Filosofi	Pilar	Definisi	Karakter	Pengejawantahan Sila Pancasila
<i>Piil Pesenggiri</i>	1. <i>Bejuluk-Beadek/ Juluk-Adek</i>	Mempunyai kepribadian sesuai dengan gelar adat yang disandangnya	1. Bertanggung Jawab 2. Berkeadilan 3. Kepemimpinan 4. Kedisiplinan 5. Kebijaksanaan 6. Keteladanan	1. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan
	2. <i>Nemui-Nyimah</i>	Aktif dalam pergaulan di Masyarakat dan tidak individualistis	1. Kejujuran 2. Rendah Hati 3. Silaturahmi 4. Empati 5. Terbuka	1. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
	3. <i>Nengah-Nyapur</i>	Saling mengunjungi untuk bersilaturahmi serta ramah menerima tamu	1. Bertoleransi 2. Bermasyarakat 3. Bermusyawarah 4. Menghargai	1. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa 3. Persatuan Indonesia
	4. <i>Sakai-Sambayan</i>	Gotong-royong dan saling membantu dengan anggota masyarakat lainnya	1. Keikhlasan 2. Kesetiakawanan 3. Kebersamaan 4. Gotong-royong	1. Ke-Tuhan-an Yang Maha Esa 5. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Penutup

Konflik yang terjadi di Kecamatan Semaka, \Kabupaten Tanggamus disebabkan oleh tindakan kriminal yang dilakukan pemuda suku Lampung yang mencuri sepeda motor penduduk suku Jawa di Masjid *pekon* Tugupapak. Pencuri tertangkap di *pekon* Sukaraja yang didominasi suku Jawa dan langsung dihakimi hingga tewas. Warga suku Lampung lain yang

melintas juga menjadi sasaran amuk masa karena juga dianggap sebagai pencuri. Keadaan ini membuat suku Lampung dari *pekon* Way Kerap, Karang Agung, dan Pardawaras merasa terhina apalagi hal ini *dibumbui* pemberitaan yang berlebihan. Warga ketiga desa ini kemudian menyerang suku Jawa di *pekon* Sukaraja dan merusak rumah-rumah suku Jawa dan menjarahnya

serta membakarnya untuk menghilangkan barang bukti.

Stereotip sebagian besar masyarakat suku Jawa terhadap suku Lampung yang dianggap sebagai preman dan pelaku berbagai tindak kriminal membuat suku Jawa mengedepankan tindakan main hakim sendiri serta mengesampingkan musyawarah dan azas praduga tak bersalah. Sebaliknya, kesuksesan suku pendatang khususnya Jawa menimbulkan kecemburuan sosial-ekonomi bagi suku Lampung. Stereotip suku Lampung terhadap suku Jawa yang dianggap telah menggeser kehidupan ekonomi mereka membuat suku Lampung melakukan aksi penjarahan harta benda suku Jawa di *pekon* Sukaraja.

Perbedaan kegiatan ekonomi dan mata pencaharian suku Lampung dan Jawa sangat mempengaruhi konflik di Kecamatan Semaka. Etos kerja yang tinggi dari suku pendatang, terutama suku Jawa dan Bali, untuk mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi dan mata pencaharian membuat mereka banyak yang menjadi orang yang sukses di Kecamatan Semaka. Hal ini berbanding terbalik dengan suku Lampung yang hanya mengandalkan sektor perkebunan yang harga komoditinya semakin menurun. Kondisi ini diperparah dengan kebutuhan adat yang memerlukan dana yang besar, sehingga untuk memenuhinya suku Lampung banyak yang menjual tanah milik mereka kepada suku pendatang karena mereka merasa gengsi kalau menjualnya ke sesama orang Lampung. Keadaan ini mendorong pergeseran nilai dalam masyarakat suku Lampung, dari masyarakat *Gemeinschaft* ke masyarakat *Gesellschaft*.

Aktualisasi nilai-nilai *Piil Pesinggiri* dalam perspektif keagamaan dan Pancasila menjadikan kearifan lokal suku Lampung ini menjadi solusi bijak menghadapi konflik ini. *Piil Pesinggiri* memiliki peranan yang besar dalam menjaga keharmonisan kehidupan masyarakat suku Lampung yang *plural*. *Piil Pesinggiri* merupakan paket penanganan sekaligus penanggulangan konflik yang dapat digunakan sekaligus sesuai dengan kaidah agama dan negara.

Daftar Pustaka

Abdul Baqi, Muhamad Fuad,. (2012). Terjemahan *Al-Lu'lu'uwalmarjan* (kumpulan hadits shahih bukhari muslim), Semarang: PT. Pustaka Riski Putra.

Ariyani, Fr., Dkk. (2014). *Konsepsi Piil Pesinggiri Menurut Masyarakat Adat Lampung (Sebuah Pendekatan Discourse Analysis)*, Lampung: Kerjasama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan dan Lembaga Penelitian UNILA.

Departemen Agama RI. (2005). *Al-Quran dan Terjemahannya*, Bandung: CV. Diponegoro.

Gerungan, W.A. (1966). *Psikologi Sosial*. Jakarta: Eresco.

Herimanto dan Winarno. (2010). *Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya Dasar*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Holilulloh. (2001). *Integrasi Sosial dan Strategi Penanganan Konflik (Studi di Desa Banjar Agung Ilir Pugung Kabupaten Tanggamus Propinsi Lampung)*. Yogyakarta: Program Pascasarjana Ketahanan Nasional UGM, Tesis, tidak diterbitkan.

Hs, Syajono. (1994). *Informasi Singkat Daerah Propinsi Lampung*. Lampung: Kanwil Depdikbud Tk. I Lampung.

Humaedi, M. Alie,. (2014). *Kegagalan Akulturasi Budaya dan Isu Agama dalam Konflik Lampung*. Jurnal Analisa, Volume 21 No. 2 Desember 2014, hlm. 149-162.

Irwan, Abdullah, dkk. (2008). *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Levang, Pt. (2003). *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi di Indonesia*, Jakarta: Grafika Yuana.

Monografi Kecamatan Semaka Tahun 2015.

MPR RI. (2014). *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI.

Pernong, Es. (2016). Pancasila Sebagai Kearifan Lokal Adat Saibatin. *Lampung Post*, 27 Juni 2016, h.12.

Profil Kecamatan Semaka Kabupaten Tanggamus Tahun 2014.

Rozi, Sf. dkk. (2006). *Kekerasan Komunal: Anatomi dan Resolusi Konflik di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Rusydi, Um. dkk. (1986). *Arsitektur Tradisional Daerah Lampung*. Lampung: Proyek

Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Depdikbud.

Sujadi, Fm. (2013). *Lampung Sai Bumi Ruwa Jurai*, Jakarta: Cita Insan Madani.

Wirawan. (2013). *Konflik dan Manajemen Konflik (Teori, Aplikasi, dan Penelitian)*, Jakarta: Salemba Humanika.

Wawancara

Wawancara dengan MD, Tokoh Masyarakat Suku Jawa di Kecamatan Semaka tanggal 12 April 2015.

Wawancara dengan MZ (gelar adat: Khadin Darmawan). Dosen sekaligus tokoh adat suku Lampung Pesisir di Kecamatan Semaka. Tanggal 23 Maret 2015.

Wawancara dengan RK. Perangkat Pemerintahan Kecamatan Semaka. Tanggal 25 Maret 2015.

